

Strategi 1: Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	Belum optimalnya institusi pelaksana RANHAM dalam melaksanakan RANHAM.	Meningkatkan kapasitas institusi pelaksana RANHAM dalam rangka mendukung dan memaksimalkan implementasi RANHAM.	a. Masih terbatasnya Pengetahuan aparat mengenai RANHAM. b. Belum terintegrasikannya RANHAM dalam program kerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. c. Keterbatasan waktu, prasarana dan sarana untuk mensosialisasikan RANHAM dan perubahan mekanisme pelaksanaannya. d. Penetapan unit dan staf yang tepat di setiap institusi untuk	a. Terbentuknya Sekretariat Bersama RANHAM b. Tersusunnya Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. c. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala.	a. Optimalisasi institusi pelaksana RANHAM. b. Bantuan teknis di institusi pelaksana RANHAM dalam rangka efektivitas pelaksanaan RANHAM. c. Peningkatan kerja sama HAM.

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
			memastikan efektifnya implementasi RANHAM oleh setiap institusi.		

Strategi 2: Penyiapan Pengesahan dan Penyusunan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	<p>a. Instrumen internasional HAM yang akan disahkan belum dipahami secara baik oleh beberapa pihak yang berwenang.</p> <p>b. Instrumen internasional HAM yang telah disahkan belum dapat dilaksanakan</p>	<p>a. Tercapainya pemahaman yang sama di antara institusi pelaksana RANHAM terhadap instrumen internasional HAM yang akan disahkan.</p> <p>b. Tersedianya data implementasi instrumen</p>	<p>a. Terbatasnya pemahaman aparat pemerintah terhadap perlunya meratifikasi instrumen internasional HAM.</p> <p>b. Terbatasnya pemahaman aparat pemerintah terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi diratifikasinya instrumen</p>	<p>a. Tersedianya kajian yang mendukung penyusunan rancangan naskah akademik dan RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM.</p> <p>b. Tersusunnya rancangan naskah akademik RUU mengenai pengesahan instrumen</p>	<p>a. Peningkatan kesepahaman antarkementerian dan lembaga dalam upaya pengesahan instrumen internasional HAM.</p> <p>b. Optimalisasi pemantauan implementasi instrumen internasional HAM dan tindak lanjut rekomendasi <i>treaty</i></p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
	secara maksimal oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	internasional HAM sebagai bahan laporan berkala ke <i>treaty bodies</i>	internasional HAM. c. Data mengenai implementasi HAM oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum terintegrasi dengan baik.	internasional HAM, tersusunnya RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM, serta terlaksananya pengharmonisasian RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM. c. Tersedianya data pada pusat data kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai bahan laporan berkala implementasi instrumen internasional HAM.	<i>bodies</i> dalam rangka penyiapan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM.

Strategi 3: Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari perspektif HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	<p>a. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM, sehingga kebijakan pemerintah masih belum memenuhi hak masyarakat.</p> <p>b. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk serasi dan selaras dengan nilai-nilai HAM.</p>	<p>a. Pemahaman nilai-nilai HAM pembentuk peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan masih terbatas.</p> <p>b. Masih terbatasnya pemahaman tentang nilai HAM perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Masih kurangnya tindak lanjut terhadap hasil kajian peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM dan</p>	<p>Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM, termasuk yang mengakomodasi hak khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>a. Harmonisasi rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan instrumen internasional HAM dan peraturan perundang-undangan lain baik vertikal maupun horizontal khususnya yang terkait dengan HAM.</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang belum berperspektif HAM.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	lebih tinggi.		belum mengakomodasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya oleh pemerintah. d. Masih terbatasnya pelibatan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.		

Strategi 4: Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak Asasi Manusia

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan	Aparat pemerintah dan masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai	a. Masih terbatasnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dalam	a. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dalam	a. Peningkatan jumlah aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan untuk

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
	masyarakat tentang HAM, termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	HAM dalam kehidupan bermasyarakat.	<p>memberikan pemahaman nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Belum semua instansi pemerintah memuat materi HAM dalam bahan ajar pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan.</p> <p>c. Belum optimalnya penanganan masalah penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>memberikan pemahaman nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memuat materi HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam bahan ajar pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakannya.</p> <p>c. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>menerapkan nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Penyebarluasan (sosialisasi/diseminasi) nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara menyeluruh dan terencana.</p>

Strategi 5: Penerapan Norma dan Standar HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
1.	Hak Hidup				
	<p>a. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat terutama penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan</p> <p>c. Meningkatkan</p>	<p>a. Masih terbatasnya sarana dan prasana kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</p> <p>b. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.</p> <p>c. Kurangnya SDM dan sarana pendukung dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penembangan dan pembakaran</p>	<p>a. Menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita.</p> <p>b. Menurunnya jumlah penderita penyakit menular.</p> <p>c. Tersedianya layanan kesehatan rehabilitasi medik pada layanan kesehatan primer.</p> <p>d. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pemanfaatan lingkungan bagi penyandang</p>	<p>a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap lingkungan yang berkualitas.</p> <p>d. Mekanisme dan prosedur pengelolaan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	<p>c. Rendahnya kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>d. Tingginya risiko penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya pada kondisi bencana alam.</p>	<p>kualitas lingkungan hidup masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>d. Melindungi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam kondisi bencana alam.</p>	<p>hutan, penangkapan ikan, dan penambangan secara ilegal.</p> <p>d. Pengelolaan bencana pengurangan risiko bencana alam belum inklusif.</p>	<p>disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>e. Berkurangnya kasus lingkungan hidup.</p> <p>f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>g. Tersedianya sistem penanggulangan bencana dan pengurangan risiko yang inklusif.</p>	<p>bencana alam dan pengurangan risiko yang inklusif.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
2	Hak Berkeluarga dan Mendapatkan Keturunan				
	Masih banyaknya masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang kesulitan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memiliki kelengkapan administrasi.	Kemudahan bagi masyarakat dari kelompok rentan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.	Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang ada belum berjalan baik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercatatnya jumlah perkawinan atau perceraian masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil. b. Meningkatnya jumlah kelompok rentan lainnya yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil. 	Peningkatan akses dan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, terutama untuk memberikan kemudahan dalam membentuk keluarga.

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
3	Hak Mengembangkan Diri				
	<p>a. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pendidikan dasar yang rendah.</p> <p>b. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan informasi publik.</p>	<p>a. Masyarakat memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung melalui pendidikan formal dan nonformal.</p> <p>b. Masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, memperoleh kemudahan akses layanan informasi publik.</p>	<p>a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan inklusi dan khusus, yang belum tersebar merata.</p> <p>b. Masih banyak instansi pemerintah yang belum menyediakan akses layanan informasi publik.</p>	<p>a. Menurunnya angka buta aksara.</p> <p>b. Meningkatnya instansi pemerintah yang menyediakan akses layanan informasi publik kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>a. Peningkatan jumlah masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh pendidikan.</p> <p>b. Peningkatan aksesibilitas informasi dan teknologi bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
4	Hak Memperoleh Keadilan				
	<p>a. Masih banyaknya kasus pidana ringan yang tidak diselesaikan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Masih terbatasnya pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang sedang menghadapi proses peradilan.</p>	<p>a. Mendorong penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Adanya kepastian untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan yang sedang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>a. Masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Masih kurangnya koordinasi penyelesaian kasus antar instansi penegak hukum dan instansi terkait.</p>	<p>a. Meningkatnya penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan.</p>	<p>a. Peningkatan penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Peningkatan penyediaan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
5	Hak Atas Kebebasan Pribadi				
	Masih tingginya jumlah konflik yang berbasis agama.	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi antarumat beragama.	Menurunnya jumlah konflik yang berbasis agama.	Peningkatan toleransi antarumat beragama.
6	Hak Atas Rasa Aman				
	<p>a. Masih terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Masih banyaknya konflik pertanahan dan penguasaan/penggunaan lahan.</p> <p>c. Masih tingginya jumlah perkelahian massal dan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat.</p> <p>c. Mengurangi tindak</p>	<p>a. Masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai HAM.</p> <p>b. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana melakukan interogasi.</p> <p>c. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan</p>	<p>a. Meningkatnya jumlah aparat penegak hukum yang memahami nilai-nilai HAM dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah sarana prasarana dalam proses penegakan hukum yang memenuhi standar minimal.</p> <p>c. Menurunnya jumlah</p>	<p>a. Pencegahan terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Percepatan penyelesaian konflik berbasis masyarakat.</p> <p>c. Pencegahan perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya pada lembaga</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	<p>demonstrasi yang bersifat anarkis.</p> <p>d. Masih rentannya posisi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.</p>	<p>perkelahian massal dan demonstrasi yang bersifat anarkis</p> <p>d. Mengurangi terjadinya kekerasan dan perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>masyarakat terhadap mekanisme alternatif penyelesaian konflik pertanahan berbasis masyarakat.</p> <p>d. Masih tingginya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>konflik pertanahan.</p> <p>d. Tersedianya standar pelayanan berbasis HAM bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya pada lembaga layanan publik.</p>	<p>layanan publik.</p>
7	Hak Atas Kesejahteraan				
	<p>a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak bagi masyarakat,</p>	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan</p>	<p>a. Pembangunan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>b. Terbatasnya lapangan pekerjaan, SDM yang terampil, dan program</p>	<p>a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat menikmati standar hidup yang layak.</p> <p>b. Meningkatnya lapangan pekerjaan</p>	<p>a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak.</p> <p>b. Peningkatan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	<p>termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terutama yang berasal dari penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Masih banyaknya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang belum dapat mengakses jaminan sosial.</p>	<p>lainnya.</p> <p>b. Meningkatnya keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Penyelenggaraan jaminan sosial yang komprehensif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>pemberdayaan.</p> <p>c. Terbatasnya cakupan Sistem Jaminan Sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>d. Masih lemahnya peran kelembagaan sosial.</p>	<p>bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>d. Meningkatnya kepesertaan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang mengakses jaminan sosial nasional.</p> <p>e. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial.</p>	<p>penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>d. Penataan asistensi sosial reguler dan temporer di pusat dan daerah.</p> <p>e. Peningkatan kepesertaan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
					lainnya dalam sistem jaminan sosial nasional. f. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial.
8	Hak Turut Serta dalam Pemerintahan				
	a. Masih banyaknya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang belum dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. b. Masih rendahnya alokasi/partisipasi penyandang disabilitas dan	a. Masyarakat dapat menggunakan hak memilih dan dipilih. b. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.	a. Sistem pendataan kependudukan yang belum akurat. b. Sarana dan prasarana penunjang dalam pemilihan umum bagi masyarakat dari kelompok rentan masih terbatas. c. Sistem perekrutan dan seleksi pegawai dalam pemerintahan masih terbatas.	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemilihan umum; b. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.	a. Peningkatan akses dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam rangka turut serta dalam pemerintahan. b. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.				
9	Hak Perempuan				
	<p>a. Masih tingginya tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.</p> <p>b. Masih tingginya angka kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada perempuan penyandang</p>	<p>a. Menurunkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.</p> <p>b. Mencegah terjadinya tindak kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan</p>	<p>a. Tingkat pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai gender masih rendah.</p> <p>b. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah.</p> <p>c. Nilai sosial dan budaya yang masih memarginalkan perempuan.</p>	<p>a. Meningkatnya persentase perempuan yang dapat mengakses dan memanfaatkan hasil pembangunan dan berpartisipasi dalam pembangunan.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi.</p> <p>c. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>a. Pengarusutamaan gender.</p> <p>b. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	disabilitas.	penyandang disabilitas.			
10	Hak Anak				
	<p>a. Masih tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak.</p> <p>b. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak dasarnya, termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Masih tingginya angka/kasus anak</p>	<p>a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan, pengeksploitasian, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak.</p> <p>b. Menurunnya jumlah anak yang belum terpenuhi hak dasarnya, termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>a. Masih rendahnya tingkat kesadaran, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>b. Nilai sosial dan budaya masyarakat yang belum ramah terhadap pemenuhan hak dasar anak, khususnya anak penyandang disabilitas dan</p>	<p>a. Menurunnya angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah anak yang dapat mengakses pemenuhan hak dasarnya, khususnya anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Menurunnya kasus anak yang</p>	<p>a. Penurunan angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak.</p> <p>b. Peningkatan akses terhadap pelayanan dan pemenuhan hak dasar bagi anak.</p> <p>c. Peningkatan pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	yang berhadapan dengan hukum.	c. Menurunnya angka/kasus anak yang berhadapan dengan hukum.	kelompok rentan lainnya. c. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	berhadapan dengan hukum.	

Strategi 6: Pelayanan Komunikasi Masyarakat

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	Dalam penanganan pelayanan komunikasi masyarakat tersebut, kendala/permasalahan yang seringkali dihadapi	a. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. b. Meningkatnya akuntabilitas	a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pelayanan komunikasi masyarakat. b. Kurangnya komitmen aparat pemerintah	a. Meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait. b. terselesaikannya permasalahan pelanggaran RANHAM	Peningkatan penanganan permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

	<p>antara lain:</p> <p>a. Fasilitas untuk menyampaikan pengaduan masyarakat masih terbatas.</p> <p>b. Kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yang menangani pengaduan.</p>	<p>instansi yang bertanggung jawab dalam penegakan HAM dan pelayanan publik.</p>	<p>dalam menindaklanjuti dan menangani pengaduan masyarakat.</p> <p>c. Terbatasnya informasi yang memuat tentang pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh/antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam menindaklanjuti dan menanganinya.</p>	<p>baik yang diadakan oleh individu maupun kelompok.</p> <p>c. Meningkatnya komitmen pimpinan/aparat pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat.</p>	
--	---	--	---	--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis